

BAB III

KEADAAN CHINA DAN INDONESIA PASCA KRISIS DAN SETELAH KRISIS

China di kenal sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah populasi mencapai 1.314.48 milyar jiwa. Sedangkan, Indonesia menempati posisi ke 4 dengan jumlah populasi 262 juta jiwa. Pertumbuhan perekonomian Indonesia perlahan-lahan terus membaik pasca krisis. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi China terus meningkat sejak Deng Xiao-ping mengizinkan investasi langsung luar negeri, hingga tahun 2017 menurut laporan Bank Dunia PDB China tahun 2016 mencapai US\$11.9 triliun.

A. China pasca Krisis Keuangan Asia

China mampu tetap bertahan melewati krisis ini bahkan sukses bukan karena bantuan dari IMF. China mengalami masa transisi selama 30 tahun, dari tahun 1978 sampai tahun 2008, dari sistem ekonomi terpusat yang diikuti industrialisasi Uni Soviet yang kemudian menjadi sistem ekonomi pasar. China juga menerapkan kebijakan pintu terbuka atau *open door* dengan menciptakan Zona Ekonomi Khusus di provinsi pesisir selatan, yang pada dasarnya merupakan zona pemrosesan ekspor yang terbuka untuk perdagangan internasional dan investasi asing. Sejak saat itu juga, China telah menciptakan Zona Perdagangan Bebas dan Zona Pengembangan Teknologi Tinggi, yang diarahkan untuk menarik investasi asing di sektor teknologi dan mempromosikan penelitian dan pengembangan. Hal ini memberikan perlindungan bagi para investor asing yang tidak dinikmati oleh perusahaan dalam negeri atau China.

Tahun dimana China meluncurkan kebijakan reformasi dan keterbukaannya yaitu tahun 1979-1981 membuat cadangan emas China tetap tidak berubah. Sementara cadangan devisa China melonjak dari US \$ 840 juta pada tahun 1979 menjadi

US \$ 154,7 miliar pada tahun 1999. Secara absolut, cadangan devisa China berada di peringkat kedua di dunia. Pada tahun 1997 China juga mengalami peningkatan pendapatan domestik bruto hingga 15%. Pada tahun 1998, hutang luar negeri jangka panjang menyumbang 88,1% dari total hutang, sementara hutang jangka pendek hanya menyumbang 11,9%. Untuk periode 1993-1998, persentase rata-rata hutang jangka panjang dan jangka pendek masing-masing adalah 87,3% dan 12,7%.¹³

Namun, disamping kekuatan yang dimiliki oleh China dalam menghadapi krisis tersebut, China juga memiliki kelemahan. Kerapuhan sistem perbankannya telah menjadi masalah yang terkenal selama bertahun-tahun. Dilemahkan oleh pinjaman bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)* kurang dikelola dan kurang mendapat peraturan dengan standar internasional, tidak dapat menawarkan berbagai layanan dan produk yang sesuai dengan ekonomi modern, terbebani oleh pajak pemerintah yang tinggi, dan tunduk pada campur tangan politik, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pinjaman. Sektor perbankan China secara keseluruhan tidak layak secara komersial. Karena kurangnya transparansi dan keterbukaan penuh terhadap sistem perbankan, jumlah total pinjaman bermasalah tetap menjadi misteri. Pada awal tahun 1998, Dai Xianglong, gubernur Bank Rakyat China (PBC), mengungkapkan bahwa pinjaman bermasalah tersebut menyumbang 25% dari total pinjaman.¹⁴

B. China setelah Krisis Keuangan Asia

Reformasi China yang dimulai pada tahun 1978 telah membuat pertumbuhan investasi, konsumsi, dan standar hidup di Cina mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, masih banyak orang Cina yang belum dapat menikmati hasil dari perkembangan perekonomian. Perekonomian Cina sebenarnya belum sepenuhnya bebas karena pemerintah yang berkuasa saat

¹³ Yueh, Linda, *The Economy of China*, United Kingdom, Edward Elgar Publishing, Inc, 2010, hal. 37-38.

¹⁴ *Ibid*

ini yaitu Partai Komunis Cina masih turun secara langsung mempengaruhi pertumbuhannya dengan beberapa perusahaan milik pemerintah China.

Misalnya pada saat krisis 2008-2009, pemerintah secara hati-hati bertindak langsung dalam menangani krisis di Cina, sehingga Cina dapat tumbuh positif pada saat itu. Dengan kombinasi mekanisme pasar dan peran pemerintah yang tepat membuat perekonomian China dapat terhindar dari krisis 2008-2009.

Pesatnya perkembangan ekonomi Cina ditopang dengan pertumbuhannya yang merupakan tertinggi di dunia dengan pertumbuhan rata-rata 10% dalam 30 tahun terakhir. Selain itu, Cina juga merupakan negara kreditur terbesar di dunia dan memiliki kira-kira 20,8% dari kepemilikan asing obligasi pemerintah Amerika Serikat. Dan banyak lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan Standard Chartered Bank yang memprediksi perekonomian Cina akan menyamai Amerika Serikat pada tahun 2020.

Tabel 3.3 Kegiatan Ekspor dan Impor China

Tahun	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Exports	195	249	266	326	438	593	762	69.1	218.6	8.5
% change	6.1	27.8	6.8	22.4	34.6	5.4	28.4	27.2	25.7	17.2
Imports	166	225	244	295	413	561.2	660	791.6	955.8	1,133.10
% change	18.2	35.8	8.2	21.2	39.8	36	17.6	20	20.8	18.5
Total	361	474	510	621	851	1,154.60	1,421.90	1,760.70	2,173.80	2,561.60
% change	11.3	31.5	7.5	21.8	37.1	35.7	23.2	23.8	23.5	17.8
Balance	29.2	24.1	22.5	30.4	25.5	32.1	102	177.5	262.2	295.5

Sumber : Laporan Tahunan yang di keluarkan oleh *China Department General of Statistics*

Prosedur dalam mendirikan sebuah usaha investasi asing di Cina, pemerintah Cina menerapkan sejumlah peraturan yang dapat menjawab berbagai persoalan, seperti manajemen tenaga kerja, pendaftaran usaha patungan, dan kontribusi modal. Liberalisasi serta kelonggaran terhadap batasan-batasan dalam penanaman modal dan pendirian perusahaan-perusahaan di Cina, adalah sejalan dengan keinginan Cina untuk menerapkan kebijakan reformasi dan membuka diri dan mewujudkan keinginan Cina untuk dapat bergabung dalam keanggotaan WTO.

Cina juga mengalirkan dananya keluar negeri untuk memacu pertumbuhan di dalam negerinya. Pada awalnya Cina tidak dikenal sebagai negara pengekspor investasi yang penting. Namun, menjelang akhir 2004, Cina sudah mendirikan 8.299 perusahaan di luar negeri dan memiliki angka kumulatif ODI (Outward Direct Investment) lebih dari US\$44,8 milyar di 150 negara. Menurut data statistik Kementerian Perdagangan Cina (Ministry of Commerce/ MOFCOM) pada tahun 2005, tercatat aliran kumulatif ODI sebesar US\$ 57,2 milyar, ini merupakan sepersepuluh dari semua aliran FDI dari negara berkembang.

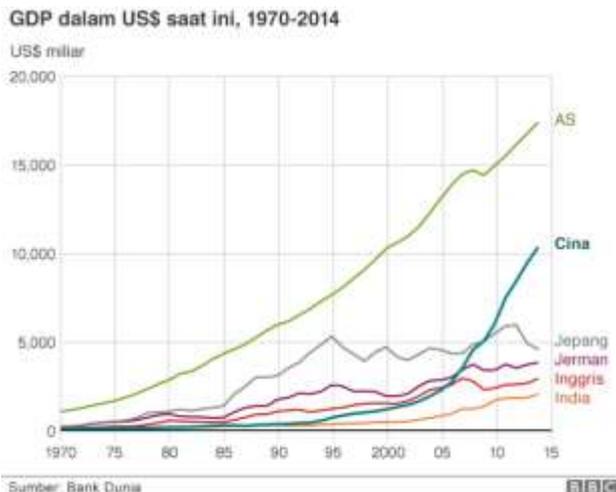
Pemerintah Cina pun antara tahun 1991-1997 membangun sebuah Tim Nasional yang berjumlah 120 perusahaan. Tim Nasional tersebut merupakan perusahaan-perusahaan besar milik negara yang nantinya akan berperan dalam arena persaingan industri di tingkat global. 120 perusahaan raksasa tersebut memiliki fungsi strategis masing-masing. 32 Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor: pelistrikan, batu bara, otomotif, elektronika, besi dan baja, mesin, kimia, material untuk konstruksi, transportasi, ruang angkasa, obat-obatan. 33 Semua perusahaan perusahaan ini mendapatkan berbagai macam fasilitas dan dukungan finansial dari negara cina sendiri.¹⁵

¹⁵ Yun-Wing, Sung, *The Emergence of Greater China*, New York USA, Palgrave Macmillan, 2005. Hal 41-42.

Pertumbuhan ekonomi Cina selama tiga dekade terakhir hingga tahun 2010 mencapai rata-rata 10%, walau kemudian pertumbuhan itu melambat.

Walaupun perekonomian Cina masih di bawah Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi yang pesat membuat perekonomian Cina kini berada di atas negara-negara maju Eropa dan Jepang.

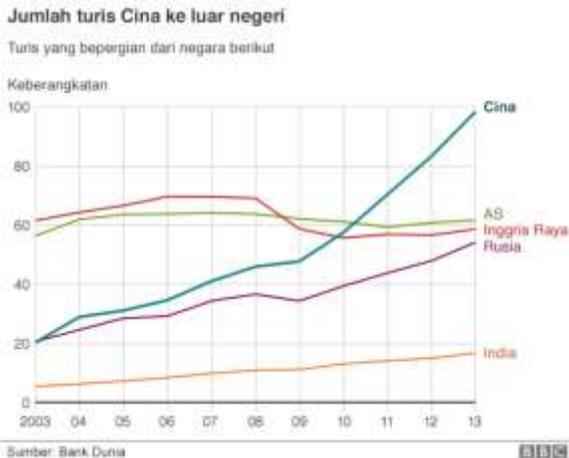
A. Grafik PDB China tahun 1970 hingga 2014



Meningkatnya perekonomian Cina dibarengi dengan meningkatnya pendapatan sehingga Cina menjadi salah satu negara dengan jumlah wisatawan terbesar yang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Wisatawan asal Cina juga berada di peringkat pertama dunia dari jumlah pengeluaran selama masa liburan, yaitu sebesar US\$165 miliar.

B. Grafik turis Cina ke luar negeri

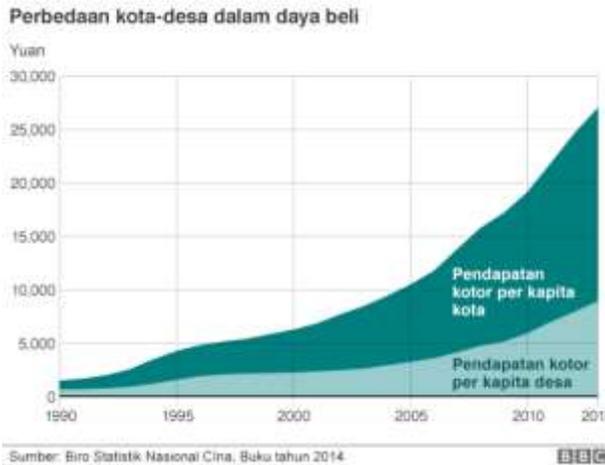


Walau memang terjadi peningkatan pendapat orang per orang, tidak semua orang menikmatinya secara seimbang.

Jurang pendapatan antara kawasan perkotaan dan pedesaan di Cina meningkat pesat sejak tahun 1990.

Dan sistem pendaftaran penduduk di Cina, semakin memperluas jurang itu karena mencegah para pekerja pendatang untuk mendapat akses atas layanan kesehatan, perumahan, dan kesejahteraan sosial di kota tempat dia bekerja.¹⁶

C. Grafik perbedaan daya beli antara desa dan kota



Pada tahun 2004, China terus mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan total PDB senilai 1.3561.5 miliar RMB (Rp 1650.7 miliar). Ini membuat China menjadi peringkat kekuatan ekonomi terbesar ke-6 di dunia. Dengan tingkat pertumbuhan tahun lalu sebesar 9,5 persen,2 menjadikan China sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Sejak peluncuran agenda reformasi, China telah membukukan tingkat pertumbuhan tinggi ekonomi tahunan yang tinggi secara dalam beberapa tahun belakangan. Diperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata tercatat dalam "10tahun Rencana Pembangunan Lima tahun" adalah sebesar 8,8 persen, jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 7 persen.¹⁷

Sejak memasuki abad ke-21, perekonomian dunia telah mengalami beberapa peningkatan dan penurunan. Dimulai

¹⁷ China's Statistics Department-General: "Official gazette on the statistics on the national socioeconomic development of the People's Republic of China in 2004", released on 28 February 2005 (People's Daily) Beijing.

dengan penurunan tajam dari 4,7 persen di tahun 2000 menjadi 1,2 persen pada tahun 2001, lalu mencatat sedikit peningkatan pada tahun 2002 dengan laju pertumbuhan sebesar 1,7 persen. Kecenderungan perbaikan terus terjadi dengan pertumbuhan tarif terdaftar pada tahun 2003 dan 2004 sebesar 2,8 persen dan 4 persen dan tahun 2005 diperkirakan sebesar 3-2 persen.³ Pada saat yang sama, kenaikan terendah China yang pernah terdaftar beberapa tahun lalu adalah 7,3 persen (tahun 2003). Tidak diragukan lagi bahwa China selalu menempati peringkat pertama dalam hal tingkat pertumbuhan ekonomi di dunia. Alasan utama di balik pertumbuhan ekonomi China yang mengesankan adalah disebabkan oleh reformasi dan kebijakan yang terbuka. Selama periode 26 tahun reformasi dan membuka diri, berdasarkan karakteristik dari era baru dan situasi dalam negeri, China telah menemukan jalan perkembangan baru untuk menghadapi globalisasi ekonomi dan mempertahankan pemerintahan sendiri dan kemandirian dalam membangun China-yang bercirikan sosialisme, yang dijuluki oleh China sebagai “pembangunan damai”.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi China bisa disebabkan dua faktor utama berikut:

Pertama, China secara konsisten melakukan kebijakan reformasi. Rapat Dewan Komite Eksekutif Pusat Partai Komunis China ketiga yang diadakan pada bulan Desember 1978 meluncurkan reformasi dan kebijakan membuka diri, menghilangkan hambatan dan keterbatasan yang ditimbulkan oleh model perencanaan pusat dan melakukan liberalisasi produksi untuk memajukan pembangunan. Metode reformasi yang telah diterapkan oleh China tampaknya sangat efektif dalam menangani hubungan trilateral antara reformasi, pembangunan dan stabilitas, sehingga menjamin pembangunan ekonomi yang pesat dan berkelanjutan China. Sejak diluncurkannya reformasi dan kebijakan membuka diri, China terus melanjutkan upaya pengembangan ekonomi yang berorientasi pasarsosialisme, menetapkan dan melaksanakan reformasi menyeluruh yang berorientasi ekonomi pasar-

sosialisme, dan mempromosikan pembangunan ekonomi-sosial nasional secara progresif dan komprehensif.

Reformasi komprehensif di bidang ekonomi dan sosial tidak hanya membuka jalan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan cepat tetapi juga berkontribusi untuk mempromosikan keadilan dan kemajuan sosial, dengan demikian meletakkan dasar bagi pembangunan berkelanjutan. Kedua, China menerapkan diplomasi perdamaian, kemerdekaan, pemerintahan sendiri, membuka kebijakan luar negeri dan aktif dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi eksternal, dan partisipasi dalam globalisasi ekonomi juga merupakan faktor penting yang memberikan kontribusi pada pengembangannya yang cepat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Memperluas, memperdalam reformasi ekonomi dan membuka diri telah menghasilkan perubahan besar dalam perdagangan luar negeri China. Perdagangan luar negeri telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Volume total perdagangan pada tahun 2004 adalah senilai USD 1154.8 miliar, tercatat peningkatan 35,7 persen secara tahunan, dimana volume ekspor mencapai Rp 593.4 miliar dan volume impor sebesar USD 561.4 miliar, meningkat 35,4 persen dan 36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut statistik awal Departemen Jenderal Bea dan Cukai China selama 10 bulan pertama tahun 2005, tercatat total volume perdagangan sebesar USD 1148.61 miliar, ditandai dengan peningkatan 24 persen setiap tahun. Total ekspor China pada periode ini diperkirakan mencapai USD 614.49 miliar dan total impor sebesar USD 534.12 milyar, 31,1 persen dan 16,7 persen lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu. Cadangan valuta asing mencapai Rp 609.9 miliar pada akhir 2004 atau Rp 206.7 miliar lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2004, China menarik FDI total sebesar USD 153.5 miliar, tingkat pertumbuhan 33,5 persen secara tahunan, dengan aliran FDI baru senilai USD 60.6 miliar, meningkat 13,3 persen.5 Sampai dengan Januari 2005, jumlah perusahaan

investasi asing yang terdaftar di China berjumlah 5.125.504 dan modal investasi mencapai USD 1109.445 miliar, dengan realisasi FDI sebesar USD 566.196 miliar. Pada tahun 2005, total PDB China mencapai 14 triliun RMB (Rp 1,6 triliun) atau lebih dari dua kali lipat PDB gabungan dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Perkapita GDP China sekarang yang di sekitar USD 1.300 adalah sama dengan Indonesia tetapi lebih tinggi dari Filipina. Dengan total jumlah nominal PDB, China menduduki peringkat ke-5 perekonomian terbesar di dunia. Dari segi paritas daya beli (PPP), perekonomian China saat ini merupakan kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat.⁶ Sebagai akibat dari kemajuan industrialisasi yang cepat, China melesat menjadi basis manufaktur terkemuka di dunia. Pada tahun 2004, China memproduksi 273 juta ton baja, 970 juta ton semen, 73 juta set TV warna, 66 juta AC, 30 juta lemari es, dan 45 juta PC.

Pada tahun 2004, China juga menjadi produsen mobil ketiga terbesar dunia, dengan total output sebesar 5,1 juta unit, setelah Amerika Serikat dan Jepang.⁷ Pada tahun 2003, China melampaui Amerika Serikat sebagai pangsa telepon terbesar dunia (263 juta jaringan tetap ditambah 269 juta ponsel (290 pada pertengahan 2004)).⁸ Juga, pada pertengahan tahun 2005, jumlah pengguna internet yang terdaftar di China ("netizens") telah melampaui 100 juta sehingga membentuk "Web populasi" terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.⁹ Pesatnya pertumbuhan ekonomi China mendorong mereka melakukan ekspansi pasar besar-besaran. Ekspansi pasar meski terkesan dilakukan dengan hati-hati, cukup meresahkan negara-negara tetangga, Jepang, Korea Selatan, dan negara ASEAN, karena diikuti basis pertumbuhannya yang kuat. China telah tampil sebagai keajaiban Asia atau *The New Miracle of Asia*, sejajar dengan Jepang, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Hongkong, yang pernah disebut-sebut sebagai pusat keajaiban ekonomi Asia. Dibandingkan dengan Jepang yang tengah menjalankan program zero growth, pertumbuhan ekonomi China saat ini mencapai 8 persen. Kesuksesan ini merupakan

bagian dari strategi market economy yang menjadi orientasi China pasca-Jiang Zemin. Reformasi Partai Komunis China (PKC) dalam Kongres November 2001, dengan memasukkan kelas kapitalis (shehui qita fangmian de youxiu fenzi) ke dalam unsur PKC, tidak hanya bertujuan merombak total hubungan majikan-pekerja dalam tradisi komunis China, tetapi juga memperkuat basis pendukung kapitalis China melakukan ekspansi pasar guna mempercepat pertumbuhan ekonominya.

Sejak dua tahun lalu China memberi ruang lebar kepada pihak swasta melakukan gebrakan ke pasar global. Pasar-pasar negara ASEAN menjadi incaran pertama pengusaha swasta China. Pasar ASEAN dinilai amat potensial. China bahkan ingin menjalin perdagangan yang intens dengan negara-negara ASEAN melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA). Dalam pertemuan ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, 2 September 2003, para politisi China coba mendekati negara-negara ASEAN dan menyampaikan keinginannya bergabung dengan AFTA sehingga menjadi ASEAN Plus Three. ASEAN sejak awal tahun 2003 telah menjadikan AFTA sebagai Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Potensi pasar ASEAN sendiri termasuk besar karena didukung 530 juta penduduk yang memiliki tingkat daya beli yang cukup tinggi, dan beberapa negara, di antaranya Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina, mulai bangkit dari krisis ekonomi yang mereka alami tahun 1997.¹⁰ Strategi baru perekonomian China, seperti kata Presiden China Hu Jianto, adalah bagaimana menjadikan China sebagai pusat produksi, sedangkan distribusi dan konsumsi diupayakan diserahkan sepenuhnya ke pasar-pasar internasional. Indonesia dan ASEAN merupakan negara-negara yang diprioritaskan China menjadi target utama barang-barang produksinya.

Selama periode 1990-2000, ekspor manufaktur Cina tumbuh sebesar 16,9% per tahun, dibandingkan dengan 10,3% untuk kawasan Asia Timur lainnya, dan pangsa pasar dunia meningkat tiga kali lipat dari 1,7% menjadi 4,4% (Lall dan Albaladejo 2004). Bagian China dari pasar ekspor global

tumbuh lebih cepat setelah tahun 2000, terhitung lebih dari 7% dari ekspor barang dunia setelah masuk WTO. Barang-barang manufaktur terdiri dari sekitar 90% dari ekspor barang dagangannya (Lall dan Albaladejo 2004). Cina telah muncul sebagai eksportir produk manufaktur terbesar di negara berkembang. Pertumbuhan ekspor manufakturnya telah menjadi salah satu yang paling cepat dicapai oleh negara-negara berkembang, dan mereka tidak, seperti yang kadang-kadang dianggap, hanya didasarkan pada tenaga kerja murah. Ekspor mencakup berbagai macam teknologi, sehingga mencerminkan rentang kekuatan kompetitif yang mengesankan, dan melakukan diversifikasi dan peningkatan dengan kecepatan luar biasa. Selain itu, meskipun kurangnya konversi penuh dari akun modal, China pada 1990-an telah menjadi negara tuan rumah terbesar kedua untuk investasi langsung asing setelah AS, pemasok modal terbesar kedelapan di dunia.¹⁸

Perekonomian China pada 2017 mengalami peningkatan. Menurut laporan Bank Dunia, besaran PDB China pada tahun 2016 mencapai US\$11.9 triliun.¹⁹ Dengan total populasi penduduk lebih dari 1,37 miliar jiwa, maka PDB per kapita China pada tahun 2016 berada di kisaran US\$14.600.²⁰ Sementara *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* memprediksi bahwa China akan mengalami perlambatan ekonominya sepanjang 2017, antara lain di picu oleh menurunnya investasi dan nilai ekspor barang dan jasa. Adapun pemicunya antara lain karena penerapan kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh negara-negara tujuan ekspor.

Menurut OECD, proyeksi angka pertumbuhan ekonomi China pada 2017 berada di kisaran 6,6%. Sedangkan faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut diantaranya adalah sektor penjualan ritel dan konsumsi dalam negeri, yang

¹⁸ Yueh, Linda, *The Economy of China*, United Kingdom, Edward Elgar Publishing, Inc, 2010.

¹⁹ data.worldbank.org

²⁰ www.cia.go.theworldfactbook: China

mencapai lebih dari 70% total PDB. Maraknya sistem penjualan barang dan jasa melalui e-commerce disinyalir berperan penting pada tingginya sumbangan sector ritel dan konsumsi domestik.²¹

Sebagai catatan, total volume perdagangan online dalam negeri China pada 2016 mencapai hingga US\$548 miliar, dengan lebih dari 90% total transaksi dilakukan melalui perangkat seluler. Dari sisi kemudahan usaha, China menempati peringkat ke 78 dari 190 negara yang di survei oleh Bank Dunia. Adapun kriteria penilaian tersebut antara lain dilihat dari lamanya waktu pemberian ijin untuk mendirikan usaha, kredit dari perbankan, aturan-aturan yang mendukung iklim usaha, hingga perlindungan terhadap investor kecil.²²

Namun demikian, seperti dikutip dari *The Financial Times*, secara mengejutkan China mengalami pertumbuhan ekonomi hingga 6,9% sampai dengan semester pertama 2017. Pencapaian ini banyak di dukung oleh meningkatnya penjualan di sector properti dan tingginya produktivitas di sektor produksi.²³ Pertumbuhan ekonomi China hingga semester pertama 2017 membuat IMF merevisi proyeksi perekonomian China di 2017 yang sebelumnya 6.5% menjadi 6.7%.²⁴

²¹ OECD Economic Surveys: China, March, 2017

²² World Bank. *Doing Business 2017: Equal Opportunity for All, Economy Profile 2017: China, 2017*

²³

www.ft.com.ChinaGDPgrowthpointsto2017economicrebound,17July2017

²⁴ www.imf.org. IMF Country Focus: China's Economic Outlook in six charts, August 15, 2017.

Tabel 3.4 Pertumbuhan Ekonomi China

Tahun/Presentase			
1979	8%	1991	4%
1981	5%	1993	14%
1983	10%	1995	9%
1985	15%	1997	6%
1987	20%	1999	9%
1989	4%	2001	10%

Sumber : Laporan Tahunan yang di keluarkan oleh China Department General of Statistics

D. Indonesia pasca Krisis Keuangan Asia

Krisis yang bermula di Thailand ini, menyebabkan Indonesia dan beberapa negara Asia, seperti Filipina, Korea dan Malaysia mengalami krisis keuangan. Ketika krisis melanda Thailand, nilai baht terhadap dolar anjlok dan menyebabkan nilai dolar menguat. Penguatan nilai tukar dolar berimbas ke rupiah. Sekitar bulan Juli 1997, di Indonesia terjadi depresiasi nilai tukar rupiah, nilai rupiah terus merosot. Di bulan Agustus 1997 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah dari Rp2.500,00 menjadi Rp2.650,00 per dolar AS. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Padahal, pada saat itu hutang luar negeri Indonesia, baik swasta maupun pemerintah, sudah sangat besar. Tatanan perbankan nasional kacau dan cadangan devisa semakin menipis. Perusahaan yang tadinya banyak meminjam dolar (ketika nilai tukar rupiah kuat terhadap dolar), kini sibuk memburu atau membeli dolar untuk membayar bunga pinjaman mereka yang telah jatuh tempo, dan harus dibayar dengan dolar. Nilai rupiah pun semakin jatuh lebih dalam lagi.

Krisis yang terjadi di Indonesia semakin parah antara lain disebabkan oleh stok hutang luar negeri swasta yang sangat

besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.

Pemerintah selama ini selalu ekstra hati-hati dalam mengelola hutang pemerintah (atau hutang publik lainnya), dan senantiasa menjaganya dalam batas-batas yang dapat tertangani. Akan tetapi untuk hutang yang dibuat oleh sektor swasta Indonesia, pemerintah sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan. Setelah krisis berlangsung, barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut benar-benar menjadi masalah yang serius. Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta.²⁵

Hal ini mirip dengan yang terjadi di negara-negara lain di Asia yang dilanda krisis. Dalam banyak hal, boleh dikatakan bahwa negara telah menjadi korban dari keberhasilannya sendiri. Mengapa demikian? Karena kreditur asing tentu bersemangat meminjamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan (swasta) di negara yang memiliki inflasi rendah, memiliki surplus anggaran, mempunyai tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan menjalankan sistem perdagangan terbuka. Selain itu, hutang swasta tersebut banyak yang tidak dilandasi oleh kelayakan ekonomi, tetapi lebih mengandalkan koneksi politik, dan seakan didukung oleh persepsi bahwa negara akan ikut menanggung biaya apabila kelak terjadi kegagalan.

Yang ikut memperburuk keadaan adalah batas waktu pinjaman (maturity) hutang swasta tersebut rata-rata makin pendek. Pada saat krisis terjadi, rata-rata batas waktu pinjaman sektor swasta adalah 18 bulan, dan menjelang Desember 1997

²⁵ data.worldbank.org

jumlah hutang yang harus dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun adalah sebesar US\$20,7 milyar.²⁶

Kemudian, banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. Ketika liberalisasi sistem perbankan diberlakukan pada pertengahan tahun 1980-an, mekanisme pengendalian dan pengawasan dari pemerintah tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor perbankan.

Yang lebih parah, hampir tidak ada penegakan hukum terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan, khususnya dalam kasus peminjaman ke kelompok bisnisnya sendiri, konsentrasi pinjaman pada pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada waktu yang bersamaan banyak sekali bank yang sesungguhnya tidak bermodal cukup atau kekurangan modal, tetapi tetap dibiarkan beroperasi. Semua ini berarti, ketika nilai rupiah mulai terdepresiasi, sistem perbankan tidak mampu menempatkan dirinya sebagai “peredam kerusakan”, tetapi justru menjadi korban langsung akibat neracanya yang tidak sehat.

Sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula. Jauh sebelum krisis terjadi, investor asing dan pelaku bisnis yang bergerak di Indonesia selalu mengeluhkan kurangnya transparansi, dan lemahnya perlindungan maupun kepastian hukum. Persoalan ini sering dikaitkan dengan tingginya “biaya siluman” yang harus dikeluarkan bila orang melakukan kegiatan bisnis di sini.

Meskipun persoalan perbankan dan hutang swasta menjadi penyebab dari krisis ekonomi, namun, kedua faktor yang disebut terakhir di atas adalah penyebab lambatya pemulihan krisis di Indonesia. Pemulihan ekonomi musykil,

²⁶ *Ibid*

bahkan tidak mungkin dicapai, tanpa pulihnya kepercayaan pasar, dan kepercayaan pasar tidak mungkin pulih tanpa stabilitas politik dan adanya pemerintahan yang terpercaya.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak awal Juli 1997, di akhir tahun itu telah berubah menjadi krisis ekonomi. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menyebabkan harga-harga naik drastis. Banyak perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Jumlah pengangguran meningkat dan bahan-bahan sembako semakin langka. Krisis ini tetap terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Yang dimaksud fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, cadangan devisa masih cukup besar dan realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus.

Kurs rupiah terhadap dollar AS melemah pada tanggal 1 Agustus 1997, pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir tahun 1997, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi 40 bank bermasalah lainnya dan mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk membantu bank-bank bermasalah tersebut. Namun kenyataannya terjadi manipulasi besar-besaran terhadap dana KLBI yang murah tersebut.

Tidak hanya itu, kepercayaan internasional terhadap Indonesia menurun, perusahaan milik Negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang akan dan telah jatuh tempo, angka pemutusan hubungan kerja meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau menghentikan kegiatannya, kesulitan menutup APBN, biaya sekolah di luar negeri melonjak, laju inflasi yang tinggi, angka kemiskinan meningkat dan persediaan barang nasional, khususnya Sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya, harga-harga barang naik tidak terkendali dan berarti biaya hidup semakin tinggi.

E. Indonesia setelah krisis Keuangan Asia Era Presiden Susilo Bambang Yudoyono

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan.

Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%²⁷

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010, seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara. Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang

²⁷ data.worldbank.org

membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia.

Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia.

Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005. Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.

Data Harga Bahan Bakar Minyak 2004 vs 2009 (Naik)

Harga	2004	2009	Catatan
Minyak Mentah Dunia / barel	~ USD 40	~ USD 45	Harga hampir sama
Premium	Rp 1810	Rp 4500	Naik 249%
Minyak Solar	Rp 1890	Rp 4500	Naik 238%
Minyak Tanah	Rp 700	Rp 2500	Naik 370%

Dengan kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800 per liter). Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triliun dari penjualan premium dan solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah

sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.

Berdasarkan janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal mensejahterakan rakyat.

Pertumbuhan	Janji Target	Realisasi	Keterangan
2004	ND	5.1%	
2005	5.5%	5.6%	Tercapai
2006	6.1%	5.5%	Tidak tercapai
2007	6.7%	6.3%	Tidak tercapai
2008	7.2%	6.2%	Tidak tercapai

Tingkat Inflasi 2004-2009 (Naik)

Secara umum setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun 2 kali lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.

Tingkat Inflasi	Janji Target	Fakta	Catatan Pencapaian
2004		6.4%	
2005	7.0%	17.1%	Gagal
2006	5.5%	6.6%	Gagal
2007	5.0%	6.6%	Gagal
2008	4.0%	11.0%	Gagal

Jumlah penduduk miskin

Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.

Penduduk			
Miskin	Jumlah	Persentase	Catatan
2004	36.1 juta	16.6%	
2005	35.1 juta	16.0%	Februari 2005
2006	39.3 juta	17.8%	Maret 2006
2007	37.2 juta	16.6%	Maret 2007
2008	35.0 juta	15.4%	Maret 2008
2009		8.2%	?????

Berdasarkan catatan koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009 meningkat 31 persen dalam lima tahun terakhir. Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun. Adapun posisi utang Januari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun atau naik Rp 392 triliun. Apabila pada tahun 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per kepala, pada Februari 2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala. Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, koalisi menilai rezim sekarang ini adalah rezim anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan turunnya secara drastis subsidi. Pada tahun 2004 jumlah subsidi masih sebesar 6,3 persen dari produk domestik bruto. Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB.

Pendidikan merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.

Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA. Perbaiki secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras. Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang

inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya.

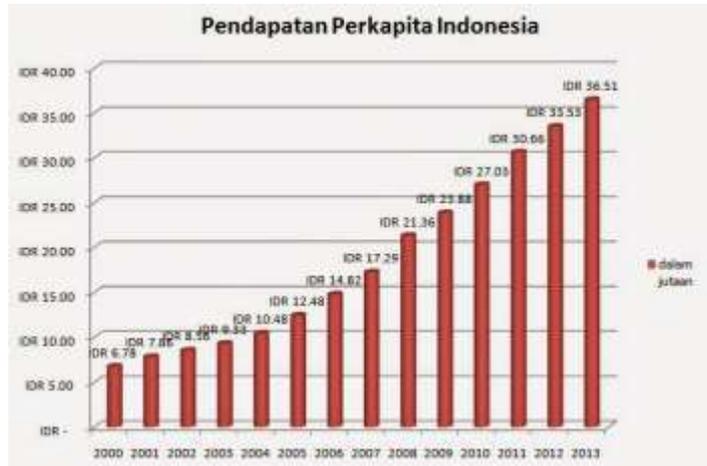
Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan. Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.

Saat membuka Rapat Kerja tentang Pelaksanaan Program Pembangunan 2011 di Jakarta Convention Center, Senin (10/1/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan mantap memaparkan 10 capaian (keberhasilan pemerintah pada tahun 2010 tersebut.

- 1) Ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang semakin kuat pada 2010. Hal ini, antara lain, tercermin dengan indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus membaik, daya saing Indonesia di tingkat dunia yang tinggi, nilai ekspor, dan investasi.
- 2) Sejumlah indikator kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan penting. Dunia memberikan penilaian pada Top Ten Movers, istilahnya prestasi Indonesia dan 9 negara yang lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan penghasilan penduduk kita.
- 3) Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, mencatat sejumlah prestasi.
- 4) Terjaga baiknya keamanan dalam
- 5) Proses perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di banyak daerah. Hambatan birokrasi dan iklim investasi serta pelayanan publik di banyak daerah mengalami kemajuan.
- 6) Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan meskipun tetap rawan dengan gejolak perekonomian

Indonesia. Presiden meminta pemerintah tetap cekatan dan memiliki rencana darurat.

- 7) Beberapa indikator ekonomi penting Indonesia mencatat rekor baru dalam sejarah, seperti income perkapita sekarang sudah tembus 3 ribu dolar AS, lima tahun lalu masih 1.186 dolar AS. Cadangan devisa dulu 36 miliar dolar AS, sekarang 96 miliar hampir 100 miliar dolar AS. Kenaikan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang tertinggi di dunia, naik 46 persen. Pendapatan domestik bruto kita meningkat dan Indonesia kini peringkat 16 ekonomi di dunia.
- 8) Makin baiknya upaya pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sedangkan Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas Rahma Iryanti di Jakarta, Kamis (7/01/2011) mengungkapkan angka pengangguran 2010 diprediksi turun menjadi 7,6 persen dari kisaran 7,87 persen tahun lalu. Penurunan tersebut seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian.
- 9) Indonesia makin berperan dalam hubungan internasional, makin nyata peran kita, baik dalam mengatasi krisis ekonomi global, dalam hubungan G20, APEC, East Asia Summit, ASEAN, G8 plus, dan pemeliharaan perdamaian dunia. “Kita aktif sekali dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia dan juga kerja sama mengatasi perubahan iklim,” tegas Presiden, sebagaimana dipublikasikan juga di situs resmi Presiden SBY.



Sumber: data diolah oleh BPS Indonesia

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Indonesia sejak tahun 2000 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan pendapatan perkapita.